

# **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pedagang Kaki Lima Menurut Peraturan Perundang-Undangan**

**Aveciena Yoe**

**Pembimbing Oleh:**

**Dr. Taufik Yahya, S.H., M.H. dan Dr. Yetniwati, S.H., M.H.**

## ***Abstrak***

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kewajiban pelaku usaha pedagang kaki lima dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha pedagang kaki lima menurut peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis bagaimana kewajiban dari pelaku usaha pedagang kaki lima dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dan Untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab dari pelaku usaha pedagang kaki lima menurut peraturan perundang-undangan. Metode penelitian ini merupakan bentuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Hasil penelitian ini adalah kewajiban pelaku usaha sudah diatur dalam Undang-Undang perlindungan konsumen, namun kewajiban pelaku usaha pedagang kaki lima dalam peraturan daerah kota Jambi tersebut belum diatur dengan baik menurut peraturan perundang-undangan, sehingga apabila pelaku usaha pedagang kaki lima menjual produk makanan dan minuman yang dapat membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan konsumen, peraturan daerah kota Jambi tidak dapat digunakan untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha pedagang kaki lima, dikarenakan pengaturan pedagang kaki lima hanya terdapat dalam peraturan daerah saja dan belum ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Peraturan daerah kota Jambi yang mengatur tentang kewajiban pedagang kaki lima masih memerlukan pembaharuan dimasa yang akan datang, sehingga apabila ada pelaku usaha pedagang kaki lima yang melanggar berupa menjual produk makanan dan minuman yang dapat membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan konsumen, akan diatur dengan peraturan daerah Nomor 12 tahun 2016 yang mempunyai norma hukum yang tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelaku usaha pedagang kaki lima.

**Kata Kunci: Perda, Konsumen, Pedagang Kaki Lima**

# **Legal Protection Against Street Vendor Consumers According To The Laws and Regulations**

**Aveciena Yoe**

**Mentor By:**

**Dr. Taufik Yahya, S.H., M.H. and Dr. Yetniwati, S.H., M.H.**

## *Abstract*

Consumer Protection is all efforts that guarantee legal certainty to provide protection to consumers. Consumer protection in Indonesia is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The formulation of the problem in this study is how the obligations of street vendors are in providing protection to consumers and how are the responsibilities of street vendors according to the laws and regulations. The purpose of this study is to analyze how the obligations of street vendors are in providing protection to consumers and to analyze how the responsibilities of street vendors are according to the laws and regulations. This research method is a form of normative juridical research, namely research that is focused on examining the rules or norms in positive law.

The results of this study are the obligations of business actors have been regulated in the consumer protection law, but the obligations of street vendors in the Jambi city regulations have not been properly regulated according to laws and regulations, so that if street vendors sell food products and drinks that can be harmful to the health and safety of consumers, Jambi city regulations cannot be used to provide strict sanctions against street vendors, because the regulation of street vendors is only contained in regional regulations and there are no specific legislation governing about structuring and empowering street vendors. Jambi city regulations governing the obligations of street vendors still require renewal in the future, so that if there are street vendors who violate the form of selling food and beverage products that can endanger the health and safety of consumers, it will be regulated by regional regulation No. 12 of 2016 which has strict legal norms in providing sanctions against street vendors.

**Keywords:** *Local Regulation, Consumer, Street Vendor*